

Analisis Usahatani, Tataniaga dan Peran Kelembagaan Petani Teh Rakyat di Kabupaten Cianjur Sebagai Kawasan Perkebunan Teh Nasional

Nurhayat Indra

Institut Manajemen Koperasi Indonesia

Abstract. This research is based on the phenomenon that the condition of tea plantation in Cianjur Regency is abandoned and damaged by the condition of underplanting population, whereas based on the Decree of the Minister of Agriculture of the Republic of Indonesia Number 46 / Kpts / PD.300 / 1/2015, Kabupaten Cianjur has designated as National Tea Plantation Area. The purpose of this research is to know: 1) Feasibility of Tea Tea farm in Cianjur District; 2) The condition of the tea community trading in Cianjur regency; and 3) The role of farmer institution in the development of Tea people in Cianjur Regency. The research was conducted in 3 (three) sub-districts of Cianjur People's Tea Center namely: Campaka, Takokak, and Sukanegara. The research methodology uses the descriptive and descriptive research with secondary and primary data sources collected through FGD. The result of this research are: (1) Farming Farming (agribusiness) of tea plantation in Cianjur Regency is not economically feasible; (2) Tataniaga Teh shoot still using the village and / or village collectors trader channel, the margin obtained by farmers and traders of collectors is still reasonable, the added value of processing is still enjoyed quite large by the local green tea processor and dry / black tea; (3) Tea farmers' institutions in improving the bargaining position of farmers in the market have not been effective yet.

Keywords: People's Tea, Farming, National Plantation Area

Abstrak. Penelitian ini dilandasi oleh adanya fenomena bahwa kondisi perkebunan Teh rakyat di Kabupaten Cianjur banyak yang terlantar dan rusak dengan kondisi populasi yang underplanting, sedangkan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 46/Kpts/PD.300/1/2015, Kabupaten Cianjur telah ditetapkan sebagai Kawasan Perkebunan Teh Nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Kelayakan usahatani Teh rakyat di Kabupaten Cianjur; 2) Kondisi tataniaga Teh rakyat di Kabupaten Cianjur; serta 3) Peranan kelembagaan petani dalam pengembangan Teh rakyat di Kabupaten Cianjur. Penelitian dilakukan di 3 (tiga) kecamatan sentra Teh rakyat Kabupaten Cianjur yaitu: Campaka, Takokak, dan Sukanegara. Metodologi penelitian menggunakan penelitian deskriptif dengan sumber data sekunder dan primer yang dihimpun melalui FGD. Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Usahatani (agribisnis) perkebunan Teh rakyat di Kabupaten Cianjur tidak layak secara ekonomi; (2) Tataniaga Teh pucuk masih menggunakan saluran pedagang pengepul desa dan atau Kecamatan, margina yang diperoleh petani dan pedagang pengepul masih wajar, nilai tambah pengolahan masih dinikmati cukup besar oleh pengolah Teh hijau local dan Teh kering/hitam; (3) Kelembagaan petani Teh dalam meningkatkan posisi tawar para petani di pasar belum berfungsi efektif.

Kata kunci: Teh Rakyat, Usahatani, Kawasan Perkebunan Nasional

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Provinsi Jawa Barat merupakan wilayah yang memiliki luas perkebunan terbesar di Indonesia. Pada tahun 2014, luas perkebunan Teh di Jawa Barat mencapai 89,977 ha atau 75.68% dengan jumlah produksi Teh mencapai 105,279 ton daun kering. Berdasarkan status pengusahaannya, perkebunan Teh di Jawa Barat terdiri

atas Perkebunan Rakyat (PR) seluas 45,850 ha; perkebunan besar negara (PBN) seluas 23,213 ha dan perkebunan besar swasta (PBS) seluas 20,914 ha (Pusdatin, 2015).

Salah satu kabupaten di Jawa Barat yang cukup besar memproduksi Teh yaitu Kabupaten Cianjur.. Pada tahun 2015, luas perkebunan Teh di Kabupaten Cianjur yaitu sebesar 23.145,80 ha dengan jumlah produksi Teh sebanyak 21.972,58 ton

(Dishutbun, 2015). Oleh karena itu, melalui Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 46/Kpts/PD.300/1/2015, Kabupaten Cianjur bersama-sama dengan Kabupaten Bandung dan Garut ditetapkan sebagai Kawasan Perkebunan Nasional untuk Komoditi Teh untuk lima tahun kedepan. Tujuan yang ingin dicapai dari penetapan kawasan perkebunan nasional adalah : (1) Mempertahankan kesinambungan usaha tani yang produktif dan efisien melalui peningkatan aktivitas usaha tani secara terpadu; (2)Memiliki produk perkebunan yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan; (3) Meningkatkan pendapatan dan daya beli petani melalui kegiatan usaha agribisnis secara berkelanjutan.

Pelestarian perkebunan TEH rakyat akan sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan petaninya. Kegembiraan dan semangat petani dalam pengusahaan tanaman Teh tersebut meningkat, apabila petani dapat menerima pendapatannya secara layak. Pendapatan yang layak ini merupakan puncak dari harapan ekonomi petani Teh rakyat. Melalui pendapatan yang diperolehnya maka petani dapat menghidupi diri dan keluarganya serta dapat merawat kebun Tehnya secara berkelanjutan.

Pendapatan petani Teh rakyat hanya dapat diperoleh melalui mekanisme pasar yang ada dan tercermin dalam perhitungan hasil penjualan bersih (HPB) dari pucuk-pucuk tanaman Tehnya. Dalam kajian ekonomi, nilai dari hasil penjualan bersih ini dapat menjadi salah satu indikator kelayakan terhadap usahatani Teh rakyat itu sendiri. Predikat layak atau tidaknya suatu usahatani (dalam sistem agribisnis) akan terkait dengan unsur-unsur yang berperan secara matematis terhadap nilai hasil tersebut.

Penelitian Wachdijono (2014) terhadap analisis usahatani Teh rakyat di Kecamatan Sukanegara, Cianjur menyimpulkan bahwa pendapatan atau hasil penjualan bersih pucuk-pucuk tanaman Tehnya yang sudah tidak layak lagi sebagai penopang kehidupan keluarga dan pemeliharaan kebun Tehnya, terutama dalam pemupukan. Menurutnya kondisi yang kurang menggembirakan tersebut disebabkan oleh rendahnya harga jual pucuk Teh, naiknya harga barang-barang kebutuhan pokok, naiknya harga sarana produksi pertanian (pupuk dan obat-obatan) dan tenaga kerja. Kondisi yang demikian menempatkan petani Teh rakyat dalam posisi yang serba sulit yang berdampak pada penelantaran kebun dan alih fungsi kebun kepada tanaman yang lebih menguntungkan seperti kopi dan sayur-sayuran, sehingga jika dibiarkan terus-menerus akan dapat mengancam keberlanjutan kebun Teh rakyat di Kabupaten Cianjur yang sudah ditetapkan sebagai kawasan perkebunan nasional. Oleh karenanya telaah terhadap analisis usahatani, tataniaga, dan peran kelembagaan petani menjadi sesuatu yang menarik untuk dianalisis lebih lanjut melalui sebuah penelitian.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan permasalahan diatas maka dapat dirumuskan pokok permasalahannya, yaitu:

1. Bagaimana kelayakan usahatani Teh rakyat di Kabupaten Cianjur ?
2. Bagaimana kondisi tataniaga Teh rakyat di Kabupaten Cianjur?
3. Bagaimana peranan kelembagaan petani dalam pengembangan Teh rakyat di Kabupaten Cianjur ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Kelayakan usahatani Teh rakyat di Kabupaten Cianjur.
2. Kondisi tataniaga Teh rakyat di Kabupaten Cianjur.
3. Peranan kelembagaan petani dalam pengembangan Teh rakyat di Kabupaten Cianjur.

D. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif melalui pendekatan survei. Metode ini dilakukan untuk memperoleh data-data dari fenomena yang berlangsung dan mencari keterangan-keterangan secara faktual, baik tentang institusi sosial dan ekonomi dari suatu kelompok atau daerah (Nasir, 1988). Selanjutnya dalam teknisnya digunakan dua bentuk penelitian, yaitu: (a) Penelitian Pustaka (Library Research) yaitu penelitian berdasarkan laporan-laporan, bukuteks, jurnal, artikel, makalah seminar, majalah dan catatan kuliah serta sumber-sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. (b) Penelitian Lapangan (Field Research), yaitu mengadakan observasi yang bersifat langsung kepada obyek penelitian. Untuk mengumpulkan data digunakan kuisisioner yang dilakukan melalui wawancara (interview).

Pemilihan wilayah sampel di Kecamatan Takokak, Sukanagara, dan Kecamatan Campaka ditentukan secara purposive berdasarkan pertimbangan bahwa luas areal perkebunan Teh rakyat dan petaninya untuk Kabupaten Cianjur terkonsentrasi di ke-tiga

kecamatan ini.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari lembaga-lambaga yang terkait atau menunjang dalam penelitian, antara lain: Kantor Pengembangan Budidaya Perkebunan Rakyat (PPBPR) Kecamatan Takokak, Campaka, dan kecamatan Sukanagara dan Kantor Dinas Perkebunan setempat. Data primer diperoleh berdasarkan hasil wawancara kepada petani Teh rakyat melalui kuisisioner dan FGD dengan jumlah peserta rata-rata 30 orang untuk tiap kecamatan dengan komposisi peserta dari representasi petani, pengurus Gapoktan, pengurus Kelompok Tani, pedagang pengumpul, pengolah Teh hijau, penyuluh perkebunan, serta unsur dari pemerintah kecamatan dan desa. Penelitian dilakukan pada September hingga November 2017.

E. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Teh Rakyat Di Kabupaten Cianjur

Perkebunan di Kabupaten Cianjur melibatkan tiga kelompok pelaku, yaitu (1) negara (perseroan terbatas perkebunan negara / PTPN), (2) swasta (perkebunan besar swasta / PBS) dan (3) rakyat (perkebunan rakyat / PR). Dari data yang ada menunjukkan adanya fakta yang menarik, yaitu new planting baik yang dilakukan oleh rakyat maupun swasta. Fakta lain yang juga menarik adalah adanya replanting oleh rakyat. Rincian mengenai luas areal menurut status perusahaan disajikan pada tabel 1.

Tabel 1
Luas Areal Tanaman Perkebunan Menurut Status Pengusahaan dan Keadaan Tanaman di Kabupaten Cianjur

No	STATUS PENGUSAHAN	LUAS AREAL TANAMAN (HA)					
		Tanaman Belum Menghasilkan	Tanaman Menghasilkan	Tanaman Tua/Rusak	JUMLAH	NEW-PLANTING	RE PLANTING
1	PR	6,474.22	19,556.45	10,436.16	36,466.83	339.69	382.63
2	PBS	555.59	7,896.60	948.04	9,400.22	105.69	-
3	PTPN	795.38	4,019.11	236.15	5,050.64	-	-
Jumlah		7,825.19	31,472.16	11,620.35	50,917.69	445.38	382.63

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Cianjur,2013

Tabel 2
Perkebunan Rakyat

Status Pengusahaan	Proporsi			
	TBM	TM	TR	JUMLAH
PR	17.8%	53.6%	28.6%	100,0%
PBS	5.9%	84.0%	10.1%	100,0%
PTPN	15.7%	79.6%	4.7%	100,0%

Total areal perkebunan Kabupaten Cianjur adalah 50.917,69

ha dengan proporsi terbesar adalah perkebunan rakyat yaitu 71,62%, proporsi terbesar berikutnya adalah perkebunan besar swasta yaitu 18,46% dan perkebunan negara mempunyai proporsi 9,92%. Ketiga status pengusahaan TBM mempunyai proporsi berturut dari yang terluas adalah PR (1,8%), PTPN (15,7%) dan PBS (5,9%). Sementara TM, yang bermakna kebun mulai ada cash in nyaq yang mempunyai proporsi terbesar berturut adalah PBS (84%), PTPN (79%) dan PR (53,6%). Fakta / data ini juga menginformasikan beban berat secara ekonomi karena penghasilan dari kebun belum optimal. Baik karena memang masuk kategori TBM dan juga karena proporsi TR untuk PR paling besar hampir 30%. Angka ini menjadi indikasi awal keharusan untuk memberi perhatian bagi TR yang lebih tinggi.

Tabel 3
Luas Areal Tanaman Perkebunan Rakyat (PR) Menurut Komoditas dan Keadaan Tanaman di Kabupaten Cianjur

No	KOMODITAS	LUAS AREAL TANAMAN (HA)						PRODUKSIRATA- (TON)	RATA PRODUKSI (TON/HA)	JUMLAH PEMILIK (KK)
		TBM	TM	TTR	JUMLAH	NEW- PLAN TING	RE - PLAN TING			
1	Teh	1,022.02	7,694.11	5,516.03	14,232.16	-	72.94	7,027.89	0.91	15,234.47
2	Kelapa	1,811.03	5,249.21	1,011.22	8,071.46	105.69	105.69	4,177.44	0.80	27,308.04
3	Aren	1,224.49	1,815.70	243.52	3,283.71	-	-	4,795.88	2.64	13,757.51
4	Kelapa Hibrida	-	895.68	1,948.92	2,844.60	-	-	645.55	0.72	7,906.52
5	Karet	820.24	1,509.83	330.20	2,660.27	165.00	179.00	996.85	0.66	4,076.14
6	Cengkeh	517.60	1,044.48	928.67	2,490.75	50.00	25.00	529.51	0.51	8,687.99
7	Kopi Robusta	176.91	691.63	183.79	1,052.33	-	-	154.84	0.22	4,277.55
8	Kopi Arabika	386.32	214.81	25.61	626.74	19.00	-	69.43	0.32	2,433.98
9	Pala	171.99	151.51	-	323.50	-	-	51.93	0.34	1,246.00
10	Kapok	0.40	171.70	67.99	240.09	-	-	46.29	0.27	1,321.97
11	Kina	184.20	2.50	2.00	188.70	-	-	1.03	0.41	550.59
12	Kakao	5.00	47.52	77.48	130.00	-	-	37.72	0.79	943.00
13	Kemiri	95.54	5.37	-	100.91	-	-	7.51	1.40	283.04
14	Panili	0.24	26.54	69.38	96.16	-	-	13.14	0.50	797.03
15	Lada	53.14	30.26	4.10	87.50	-	-	11.97	0.40	886.00
16	Nilam	5.10	5.10	12.75	22.95	-	-	0.25	0.05	2.55
17	Kayu Manis	-	0.50	9.50	10.00	-	-	0.18	0.36	36.00
18	Jambu Mete	-	-	5.00	5.00	-	-	-	-	20.00
19	Kelapa Sawit	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		6,474.22	19,556.45	10,436.16	36,466.83	339.69	382.63			89,768.39

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Cianjur, 2013

Potensi perkebunan rakyat di Kabupaten Cianjur menjadi tidak bermakna pada kondisi sumberdaya manusia (SDM) yang lemah. Potensi besar di sub sektor perkebunan akan membawa manfaat bagi penduduk dengan tuntutan penguasaan teknologi

serta inovasi-inovasi terbaru di bidang kultur teknis (kegiatan hulu) sampai pengolahan dan pemasarannya (kegiatan hilir). Potensi perkebunan tidak lepas dari potensi SDM, baik menyangkut aspek kuantitas maupun aspek kualitasnya.

Penduduk dan Tenaga Kerja

Penduduk Kabupaten Cianjur menurut Kabupaten Cianjur Dalam Angka 2016 adalah 2.243.904 jiwa. Rincian jumlah penduduk ini adalah 1.155.177 jiwa penduduk laki-laki dan 1.088.727 jiwa penduduk perempuan. Jadi sex ratio penduduk Kabupaten Cianjur adalah 106,10. Angka sex ratio ini menyatakan jumlah penduduk laki-laki yang lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Jumlah penduduk di Kabupaten Cianjur mempunyai proporsi sekitar 5,12% dari penduduk Provinsi Jawa Barat. Dengan luasan 3.614,34 km² maka kepadatan penduduk rata-rata di Kabupaten Cianjur adalah 621 jiwa/km², sementara kepadatan penduduk rata-rata di Provinsi Jawa Barat adalah 1.217 jiwa/km².

Jumlah penduduk terbanyak ada di Kecamatan Cianjur yaitu sebanyak 163.828 jiwa atau 7,29 % dari jumlah total penduduk Kabupaten Cianjur, terbanyak selanjutnya yaitu Karangtengah 6,18 % dan Cibeber 5,33 %, sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit di Campaka Mulya dan Leles. Sebaran penduduk di Kabupaten Cianjur tidak merata, sekitar 60% lebih penduduk tinggal di wilayah bagian utara.

Data penduduk Kabupaten Cianjur menurut kelompok umur dan jenis kelamin disajikan pada tabel 4.

Tabel 4

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
00 – 04	110,683	106,555	217,238
05 – 09	111,072	104,057	215,579
10 – 14	113,059	107,713	220,772
15 – 19	106,415	95,625	202,040
20 – 24	94,768	85,961	180,729
25 – 29	86,002	77,970	163,972
30 – 34	81,050	77,458	158,508
35 – 39	85,982	82,329	168,311
40 - 44	79,975	76,182	156,157
45 - 49	76,307	70,594	146,901
50 – 54	63,204	59,263	122,467
55 – 59	51,147	45,715	96,862
60 – 64	36.378	33,965	70,343
65 +	59,135	64,890	124,025
Total	1.155.177	1.088.727	2.243.904

Sumber : Kabupaten Cianjur Dalam Angka, 2016

Dengan melihat table di atas maka jumlah usia produktif sebagai potensi tenaga kerja di Kabupaten Cianjur mencapai 65,43 % dari jumlah penduduk sebagaimana dipetakan sebagai berikut :

Tabel 5

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
0-14	334.814	318.775	653.589
15-64	761.228	705.062	1.466.290
65+	59.135	64.890	124.025
Total	1.155.177	1.088.727	2.243.904

Diolah dari Kabupaten Cianjur Dalam Angka Tahun 2016

Angkatan kerja yang bekerja di sektor pertanian, Kehutanan, Perburuan dan perikanan mencapai 55,81 persen, industri pengolahan 4,69 persen, perdagangan, Rumah Makan dan Hotel 18,78 persen, jasa kemasyarakatan 4,92 persen, dan lainnya meliputi pertambangan dan penggalian, listrik, gas & air, bangunan, angkutan, pergudangan dan komunikasi, keuangan, asuransi, persewaan dan jasa perusahaan mencapai 15,89 persen. Dengan demikian sektor pertanian masih mendominasi penyerapan tenaga kerja terbesar dan disusul oleh sektor perdagangan.

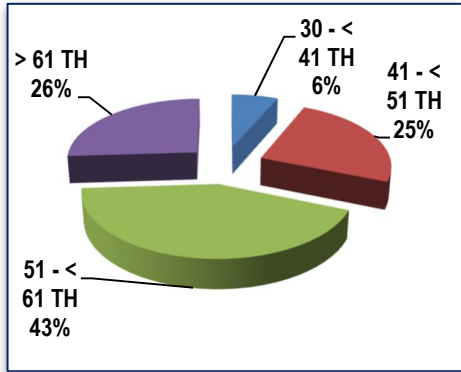
Kondisi kependudukan di 3 lokasi kecamatan studi kecamatan (Sukanegara, Takokak dan Campaka) dapat dilihat pada table 6.

Sebuah gambaran yang diperoleh dari kegiatan inventarisasi dan evaluasi komoditas perkebunan di Kabupaten Cianjur (2013) memberikan gambaran umum petani yang bertahan di sektor pertanian umumnya dan khususnya sub sektor perkebunan rakyat adalah para orang tua dengan kisaran umur 51 – 61 tahun (43%), proporsi kedua dengan jumlah 26% adalah petani tua dengan umur > 61 tahun, dan proporsi ketiga dengan jumlah 25% adalah petani kelompok kisaran umur 41 – 51 tahun. Petani muda dengan umur di bawah 41 tahun (30 – 41 tahun) hanya 6%. Data atau fakta ini sebenarnya memberi warning bagi semua *stake holder* sektor pertanian umumnya dan khususnya sub sektor perkebunan bahwa tingkat krusialitas keterlibatan generasi muda dalam sektor pertanian sudah sangat mengkhawatirkan.

Tabel 6

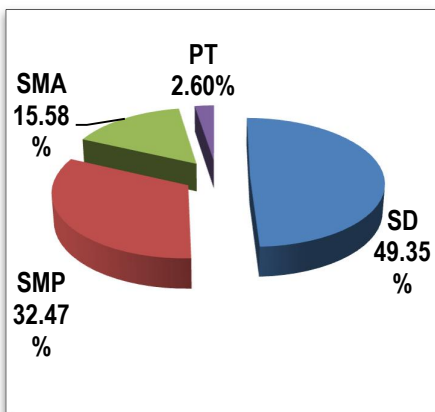
Kondisi kependudukan di 3 lokasi kecamatan studi kecamatan (Sukanegara, Takokak dan Campaka)

Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah	Rasio Jenis Kelamin	Jumlah Rumah Tangga
	Laki-laki	Perempuan			
Sukanagara	25.856	24.552	50.408	105,31	14.439
Takokak	26.681	25.550	52.231	104,43	16.634
Campaka	33.427	31.963	65.390	104,58	19.753



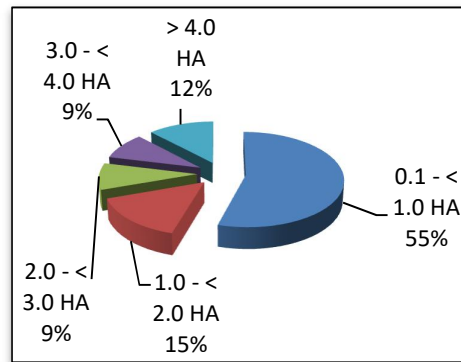
Gambar 1. Grafik Sebaran Umur Petani Pekebun

Sedangkan gambaran dari aspek pendidikan petani mengindikasikan kualitas SDM yang terlibat di sektor pertanian/ sub sektor perkebunan. Hampir 50% SDM petani di sub sektor perkebunan belum menyelesaikan/ tidak menyelesaikan wajib belajar 9 tahun (setara SLTP). Data ini mengindikasikan masih diperlukannya pendampingan untuk petani dalam mereka melakukan usaha taninya. Baik berkaitan dengan kultur teknis, daya beli pengadaan sarana produksi sampai pemberian nilai tambah sebagai prasyarat mereka untuk dapat terlibat di kegiatan hilir atau pemasaran.



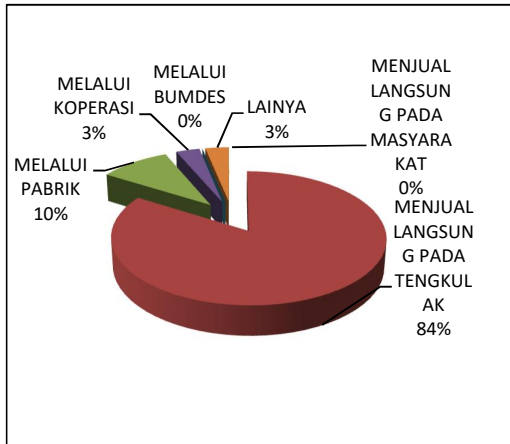
Gambar 2. Grafik Sebaran Tingkat Pendidikan Petani Pekebun

Dari aspek pemilikan kebun Teh < 1 ha mempunyai proporsi terbesar yaitu mencapai 55%; luasan kebun Teh kisaran 1 – 2 ha mempunyai proporsi 15%; luasan kebun kisaran 2 – 3 ha mempunyai proporsi 9%, luasan kebun kisaran 3 – 4 ha mempunyai proporsi 9% dan petani dengan pemilikan > 4 ha mempunyai proporsi 12%. Permasalahan kesejahteraan terkait petani Teh dapat dicermati dari sebagian besar petani hanya memiliki lahan < 1 ha.



Gambar 3. Grafik Kepemilikan Kebun Teh oleh Petani Pekebun

Sedangkan dari aspek Tatanaga, Proporsi petani yang menjual langsung ke tengkulak sangat besar, dapat dikatakan hampir semua petani, yaitu 84%. Pola penjualan yang relatif menguntungkan petani karena memperpendek rantai pemasaran adalah penjualan melalui pabrik, melalui koperasi dan lainnya. Penjualan melalui koperasi masih sangat kecil, yaitu 3%.



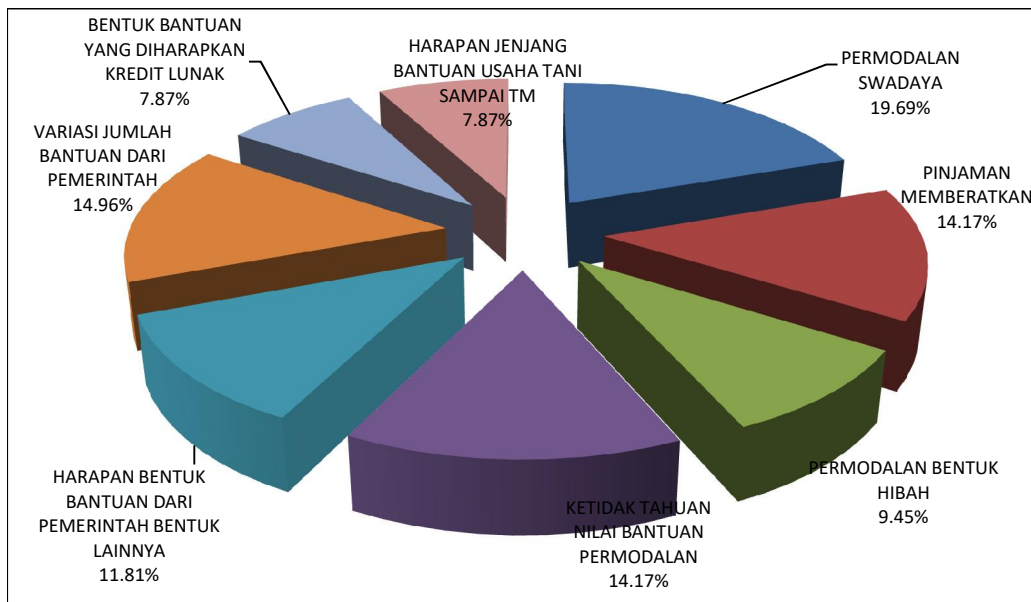
Gambar 4. Grafik Tata Niaga Teh Di Kalangan Petani Pekebun

Berkaitan dengan komponen permodalan yang mereka punya dalam menjalankan usaha tani Teh, yaitu ada petani dengan proporsi sampai hampir 20% yang permodalannya adalah swadaya. Paling tidak masih ada sekitar 14% petani yang belum tahu sumber-sumber untuk permodalan diperoleh dari mana. Ini mengindikasikan kebutuhan akan informasi yang dapat diakses oleh petani.

Analisis Usahatani

Dari kajian awal mengenai permasalahan utama dalam pelestarian dan pembangunan kawasan perkebunan Teh rakyat di Jawa Barat adalah keterbatasan kemampuan modal usahatani yang dimiliki para rumah tangga petani pekebun. Artinya bahwa rumah tangga petani Teh pada umumnya memiliki pendapatan yang rendah atau kurang layak yang menyebabkan petani tidak memiliki tabungan untuk modal pemeliharaan tanaman Teh yang ada apalagi untuk melakukan peremajaan tanaman tua yang rata-rata membutuhkan modal yang cukup besar untuk setiap hektarnya.

Oleh karena itu, kajian mengenai analisis usahatani Teh rakyat di wilayah kajian menjadi mutlak dilakukan sebagai bagian dari analisis social ekonomi petani yang ada di kawasan perkebunan Teh Kabupaten Cianjur. Analisis ini dimaksudkan untuk memetakan kondisi eksisting pendapatan petani Teh rakyat dan permasalahannya. Pendekatan untuk



Gambar 5. Grafik Komponen Permodalan Usaha Tani Teh

menghimpun data yang dibutuhkan dalam analisis usahatani ini dilakukan dengan wawancara langsung dengan para petani Teh yang diundang dalam acara FGD dan pengisian kuesioner. Asumsi perhitungan menggunakan satuan hektar, periode

perhitungan satu tahun, populasi tanaman 60 % (setara dengan 6000 pohon per hektar), dan belum memperhitungkan biaya penyusutan tanaman. Hasil analisis usahatani per hektar disajikan pada table 7.

Tabel 7
Analisis Usahatani Teh Rakyat Per Hektar Per Tahun Di Wilayah Kajian

No	Uraian	Satuan	Jumlah	Harga	Total
A	Tenaga Kerja				
1	Olah lahan dengan manual				
2	Pemupukan	HOK	5	40.000	200.000
3	Penyiraman	HOK	50	35.000	1.750.000
4	Pemangkasan	HOK	8	50.000	400.000
5	Pemetikan (Borong)	Kg	12.000	750	9.000.000
Jumlah					11.350.000
B	Saprotan				
1	Benih				
2	Pupuk :				
	Urea	Kg	600	2.000	1.200.000
	NPK	Kg	200	2.500	500.000
Jumlah					13.050.000
Total Biaya Usaha Tani					
	Pendapatan petani				
	Produksi Teh pucuk basah per ha	Kg	12.000	1.800	21.600.000
Pendapatan Bersih Petani per tahun (Rp)					8.550.000
Pendapatan Petani Per Bulan (Rp)					712.500

Jika dicermati dari table diatas, maka rata-rata pendapatan petani Teh rakyat di kecamatan Takokak hanya sebesar Rp712.000 per bulan untuk setiap kepemilikan lahan 1 hektar. Jika rata-rata kemilikan luas lahan tanaman Teh hanya 0,5 hektar maka akan mendapatkan pendapatan bersi se bulan sekitar Rp 350.000 saja. Pendapatan petani ini sangat rendah jauh dibawah UMR Kabupaten Cianjur yang sudah mencapai Rp1.800.000 per bulan. Wachdijono (2014) dalam kesimpulan penelitiannya memperoleh hasil yang lebih parah lagi yaitu pendapatan bersih petani Teh di kecamatan Sukanagara di Kabupaten Cianjur secara nyata lebih rendah dari biaya produksinya.

Ini adalah akar permasalahan dalam pelestarian dan pembangunan perkebunan Teh rakyat di Kabupaten Cianjur pada umumnya. Dengan pendapatan yang rendah, para petani seringkali menelantarkan kebunnya (tidak dipelihara dan dirawat dengan semestinya) menyebabkan sebagian besar tanaman Teh rusak, populasi jarang, dan produktivitas tanaman yang rendah. Karena terdesak untuk kebutuhan hidup sehari-hari, banyak petani yang memetik daun Teh dengan cara diarit yang akan menambah kerusakan tanaman. Kondisi ini yang mendorong alih fungsi lahan Teh kepada komoditas lainnya seperti kopi dan sayur-sayuran.

Dari hasil wawan cara pada saat FGD, hanya para petani kaya (yang kepemilikan lahannya lebih dari 4 Ha) yang melaksanakan budidaya dan pemeliharaan Teh dengan baik dan benar. Kelompok ini rata-rata menghasilkan kualitas daun Teh yang baik dengan produktivitas rata-rata mencapai 30 ton pucuk basah per tahun, dan populasi tanaman mencapai 80 sampai 90 persen. Kelompok elit

petani ini rata-rata mampu memperoleh pendapatan sekitar Rp1.800.000 per bulan dari setiap hektar tanaman Teh yang diusahakannya. Sehingga mereka tidak begitu menghadapi masalah permodalan untuk pemeliharaan dan peremajaan. Mereka juga biasanya sudah dipercaya untuk mendapatkan fasilitas KUR (Kredit Usaha Rakyat) dari Bank.

Tataniaga Teh Rakyat

Kajian mengenai tataniaga hasil perkebunan Teh rakyat di Kecamatan Takokak, Campaka, dan Sukanagara pada hakekatnya ingin mengetahui sejauh mana rantai pasok dan rantai nilai Teh rakyat memberikan manfaat harga dan nilai tambah yang dinikmati oleh para petani dan para pelaku tataniaga dalam rantai pasok tersebut. Apakah harga dan nilai tambah produk dari harga yang dibayarkan oleh konsumen akhir telah dinikmati secara adil oleh produsen (petani) dan para pelaku tata niaga. Hal ini akan mencerminkan efisiensi pemasaran Teh rakyat di wilayah studi.

Untuk memahami tata niaga Teh secara baik dan benar, ada baiknya kita merujuk pada konsep tata niaga dan manajemen rantai pasok. Definisi rantai pasokan atau *supply chain management, is Teh integrated planning, implementation, coordination and control of all business processes and activities necessary to produce and deliver, as Efficiently as possible, products that satisfy market requirements* (Vorstet al, 2007).

Fungsi rantai pasok dapat dipelajari dari dua fungsi yaitu fungsi yang berkaitan dengan aliran fisik barang (komoditi) dan fungsi yang berkaitan dengan harga komoditi dan cara pembayarannya.

Fungsi rantai pasok yang berkaitan dengan aliran atau distribusi

fisik komoditi meliputi:

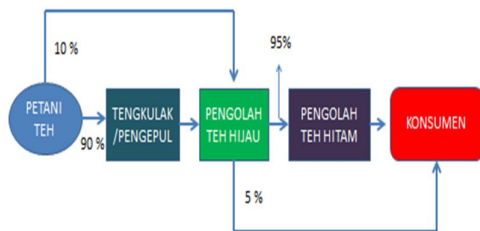
1. Gerakan spasial komoditas dari produsen ke konsumen akhir atau industri pengguna.
2. Penyimpanan dan pergudangan.
3. Transformasi fisik dari komoditas bahan mentah menjadi produk jadi yang berkualitas siap konsumsi.

Sedangkan fungsi rantai pasok yang berkaitan dengan harga dan cara pembayaran yang meliputi:

1. Perpindahan dari pendapatan penjualan akhir kepada pihak yang terlibat dalam pengolahan, tataniaga, dan petani/peternak.
2. Perpindahan harga kembali (harga dari konsumen akhir) kepada siapa saja yang terlibat dalam proses, marketing, dan petani.

Dengan menggunakan 2 pendekatan fungsi tata niaga atau rantai pasok tersebut, kita dapat memotret sekaligus menganalisis efektivitas dan efisiensi tata niaga hasil perkebunan Teh rakyat di Kecamatan Takokak.

RANTAI TATA NIAGA TEH RAKYAT DI KECAMATAN TAKOKAK



1. Gerakan Spasial Komoditi Teh dari Petani ke Konsumen Akhir atau industri Pengguna. Gerakan fisik komoditi Teh rakyat dari kecamatan Takokak sampai konsumen akhir dapat dipetakan seperti gambar di

atas. Produksi Teh berupa daun Teh pucuk segar yang diproduksi petani 90 % di jual petani kepada pedagang pengepul atau tengkulak desa dan kecamatan dan selanjutnya didistribusikan lagi kepada para pengolah Teh hijau yang ada di dalam kecamatan Takokak. Hanya sebesar 5 % dari produksi Teh petani yang langsung di jual kepada para pengolah Teh hijau local. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rantai distribusi Teh rakyat di Kecamatan Takokak masih relative sederhana, dan rantai pendek. Gerakan spasial dari produk baru terjadi keluar dari kecamatan Takokak setelah menjadi Teh hijau olahan ke industry pengolahan Teh lanjutan (Teh hitam dan industry minuman) yang ada di Kota Sukabumi dan Jawa Tengah.

Jumlah pedagang pengepul atau tengkulak Teh rakyat di Kecamatan Takokak sebanyak 20 orang, sedangkan pabrik pengolah Teh hijau berjumlah sekitar 4 orang/pengusaha.

2. Penyimpanan dan Pergudangan. Karena sifat dari daun Teh hijau yang harus cepat diolah sebelum terjadi pembusukan dan fermentasi (hanya tahan sekitar 2 hari), maka fungsi penyimpanan dan pergudangan di tingkat petani dan para pengepul belum dilakukan. Fungsi penyimpanan dan pergudangan baru dilakukan di tingkat pengolah Teh hijau dan industry pengolah lanjutan karena sifat produknya yang dapat disimpan lama.

3. Transformasi Fisik dari Komoditas.

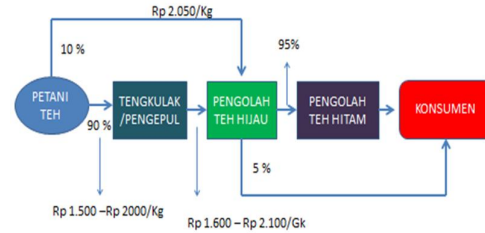
Transformasi fisik dari daun Teh segar sebagai bahan baku industry mengikuti tahapan pengolahannya. Pengolahan tahap satu, yaitu dari daun Teh segar menjadi Teh hijau kering. Transformasi tahap dua yaitu dari Teh hijau kering menjadi Teh hitam. Dan transformasi fisik tahap tiga dari Teh hijau/Teh hitam menjadi makanan dan minuman ber cita rasa Teh (sebagai komponen perasa/pewarna).

Dalam kajian ini, peneliti hanya bisa mengamati dan mempelajari transformasi fisik dari daun Teh segar menjadi produk olahan Teh hijau kering. Proses pengolahan dari daun Teh segar menjadi Teh hijau kering hasil olahan memakan waktu sekitar 24 jam, dengan konversi rendemen dari daun segar menjadi Teh hijau kering sebesar 19 sampai 20 %. Artinya jika 100 kg daun Teh segar menjadi Teh hijau kering sebanyak 19 sampai dengan 20 kg saja.

4. Perpindahan Harga (Distribusi Margin).

Perpindahan harga kembali (harga dari konsumen akhir) kepada siapa saja yang terlibat dalam proses, marketing, dan petani dalam tataniaga Teh rakyat di Kecamatan Takokak hanya bisa diamati/diteliti dari pabrik pengolah Teh hijau local sampai ke petani. Hal ini disebabkan karena keterbatasan waktu studi yang belum meneliti sampai kepada tingkat harga pada konsumen akhir.

DISTRIBUSI MARGIN TEH RAKYAT DI KECAMATAN TAKOKAK



Harga jual daun Teh segar dari petani apabila melalui Tengkulak berkisar antara Rp 1.500 sampai dengan Rp 2.000 per Kg. Sedangkan apabila menjual langsung kepada pabrik pengolah Teh hijau local berkisar antara Rp 1.550 sampai dengan Rp 2.050 per Kg. Selanjutnya Tengkulak menjualnya kepada Pengolah Teh hijau berkisar antara Rp 1.600 sampai dengan Rp 2.100 per Kg. Jadi margin yang diterima oleh tengkulak rata-rata sebesar Rp 100 per Kg. Margin ini didalamnya masuk komponen biaya angkut, susut, biaya tenaga kerja, bunga modal dan keuntungan. Dari indikasi ini agaknya rantai tata niaga Teh rakyat dari tingkat petani sampai dengan pabrik pengolah cukup efisien. Sedangkan berapa harga yang diterima petani jika dibandingkan dari harga yang dibayarkan konsumen akhir masih belum dapat disimpulkan.

Kelembagaan Petani

Kelembagaan petani Teh rakyat di Kabupaten Cianjur pada umumnya masih berupa Kelompok Tani (KT) dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang inisiasi pembentukannya diprakarsai oleh pihak pemerintah yaitu dinas pertanian, perkebunan dan hortikultura Kabupaten Cianjur. Fungsi dan peran dari KT dan Gapoktan ini pada umumnya baru menangani masalah budidaya, belum menyentuh kegiatan ekonomi anggota termasuk menangani masalah pemasaran.

Untuk melihat sejauh mana kinerja kelembagaan petani TEH rakyat di Kabupaten Cianjur, dipergunakan dua puluh indikator yang dijadikan sebagai kelengkapan suatu kelembagaan yang ideal, yaitu 1) Sekretariat, 2) Pengelola/Pengurus, 3) Administrasi, 4) Peraturan (AD/ART), 5) Rencana Kerja, 6) Pertemuan Rutin Kelompok, 7) Data Perkembangan, 8) Simpanan Anggota Kelompok, 9) Usaha Kelompok, 10) Monitoring dan Evaluasi, 11) Laporan Kondisi

Anggota Kelompok, 12) Laporan Kegiatan dan Keuangan Kelompok, 13) Kemitraan, 14) Akses Terhadap Permodalan, 15) Ketersediaan Bisnis Plan, 16) Manajemen produksi, 17) Manajemen Pemasaran, 18) Manajemen SDM, 19) Manajemen Keuangan, serta 20) peningkatan pendapatan anggota kelompok. Rekapitulasi hasil masing-masing indikator ini diuraikan secara deskriptif pada table 8.

Tabel 8
Rekapitulasi Kinerja Kelembagaan Petani TEH Rakyat Kabupaten Cianjur

No	Indikator Kinerja	Nilai Kinerja	Sangat Rendah	Moderat	Baik	Sangat Baik
1	Sekretariat	34,29	x			
2	Pengelola /Pengurus	52,38		x		
3	Administrasi	60,95			x	
4	Peraturan (AD/ART)	39,05	x			
5	Rencana Kerja	47,62		x		
6	Pertemuan Rutin Kel	50,48		x		
7	Data Perkembangan	37,14	x			
8	Simpanan Anggota Kel	23,81	x			
9	Usaha kelompok	13,33	x			
10	Monitoring & Evaluasi	27,62	x			
11	Laporan Kondisi Ang Kel	24,76	x			
12	Lap Keg dan Keu Kelp	24,76	x			
13	Kemitraan	31,34	x			
14	Akses ke Permodalan	29,52	x			
15	Ketersediaan BisnisPlan	22,86	x			
16	Manajemen Produksi	29,52	x			
17	Manajemen Pemasaran	25,71	x			
18	ManajemenSDM	37,89	x			
19	Manajemen Keuangan	32,94	x			
20	Peningkatan Pendapatan	52,86		x		

Dari hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat kinerja kelembagaan kelompok tani Teh di tiga kecamatan (Campaka, Takokak, dan Sukanagara) pada umumnya masih memiliki kinerja yang rendah. Atau dalam arti lain, kelembagaan perani masih belum berperan seerti yang diharapkan terutama dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan ekonomi anggota yang pada umumnya masih memperoleh pendapatan usahatani yang rendah, atau tidak layak. Kelembagaan biasanya baru berfungsi apabila ada bantuan dari pemerintah. Masalah lainnya adalah proses regenerasi kepengurusan kelompok tani dan Gapoktan juga pada umumnya tidak berjalan. Hampir sebagian besar Ketua Kelompok tani dan Gapoktan masih dipegang oleh para petani senior yang usianya rata-rata diatas 60 tahun.

F. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat diambil suatu kesimpulan, sebagai berikut:

1. Usahatani (agribisnis) perkebunan Teh rakyat di Kabupaten Cianjur tidak layak secara ekonomi yang rata-rata pendapatan per hektarnya jauh lebih rendah dari Upah Minimum Kabupaten.
2. Tataniaga teh pucuk masih menggunakan saluran pedagang pengepul desa dan atau Kecamatan, margina yang diperoleh petani dan pedagang pengepul masih wajar, diduga nilai tambah pengolahan masih dinikmati cukup besar oleh pengolah teh hijau local dan teh kering/hitam.
3. Kelembagaan petani teh dalam

meningkatkan posisi tawar para petani di pasar belum berfungsi dengan baik sesuai yang diharapkan.

Saran

Pengembangan dan pelestarian teh rakyat di Kabupaten Cianjur harus diorientasikan kepada peningkatan pendapatan bersih petani dengan dukungan kebijakan insentif yang terintegrasi di sector input, budidaya, pengolahan, pemasaran dan kelembagaan penunjangnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Azzaino, Zulkifli, 1980, "Pengantar Tataniaga Pertanian", Departemen Ilmu-Ilmu Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Biro Pusat Statistik, 2016, "Kabupaten Cianjur Dalam Angka", Kabupaten Cianjur.
- Dinas Pertanian, Perkebunan dan Hrtikultura Kabupaten Cianjur. 2017," Kerangka Acuan Pekerjaan Action Plan Pembangunan Perkebunan Teh Rakyat Dalam Mendukung Kawasan Perkebunan Teh Nasional, Kabupaten Cianjur.
- Kurnia, Nia, 1997, "Strategi Wanita Pemetik Teh Dalam Aktivitas Ekonomi Keluarga", Skripsi Fakultas Sastra Universitas Gajahmada, Yogyakarta.
- Mubyarto, 1995, Pengantar Ekonomi Pertanian, LP3ES, Jakarta.
- Nasir, Muhammad, 1988, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Nawawi, Hadari, 1989, Metode Penelitian Bidang Sosial, Gajahmada University Press, Yogyakarta.
- Soekartawi. (1995). Analisis Usaha Tani. Penerbit Universitas

Indonesia Press, Jakarta.

Wachdijono, 2014, Analisis Hasil Penjualan Bersih Pucuk Teh Rakyat Di Kecamatan Sukanagara Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat. Jurnal ARIJATI Vol 25 No 1, April 2014.